

LAPORAN KINERJA (LKJ) DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021



KABUPATEN PESISIR
SELATAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah laporan kinerja tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dengan 11 Sasaran Strategis dan 27 indikator kinerja utama. Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2021, sebagai berikut :

MISI 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 1 sebesar 96,45%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 :
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,20	3,34	104%
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	93 (Informatif)	93 (Informatif)	100%

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 telah dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan hasil pelaksanaan program/kegiatan komunikasi dan informatika pada tahun 2021 dan merupakan tahun pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2021-2026.

Program/kegiatan-kegiatan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan selama tahun 2021 adalah upaya peningkatan pendapatan dan terciptanya komunikasi dan informatika secara umum mencapai sasaran, namun demikian berbagai kendala masih menghambat pelaksanaan beberapa program/kegiatan sesuai sasaran yang diinginkan, hal ini kedepan tentu membutuhkan pemikiran lebih lanjut dalam pemecahan, serta melakukan perbaikan dan penajaman Renstra, Program dan Kegiatan pada periode 2021-2026 kedepan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Painan, Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



JUNAIDI, S.Kom, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700609 199703 1 002

BAB I

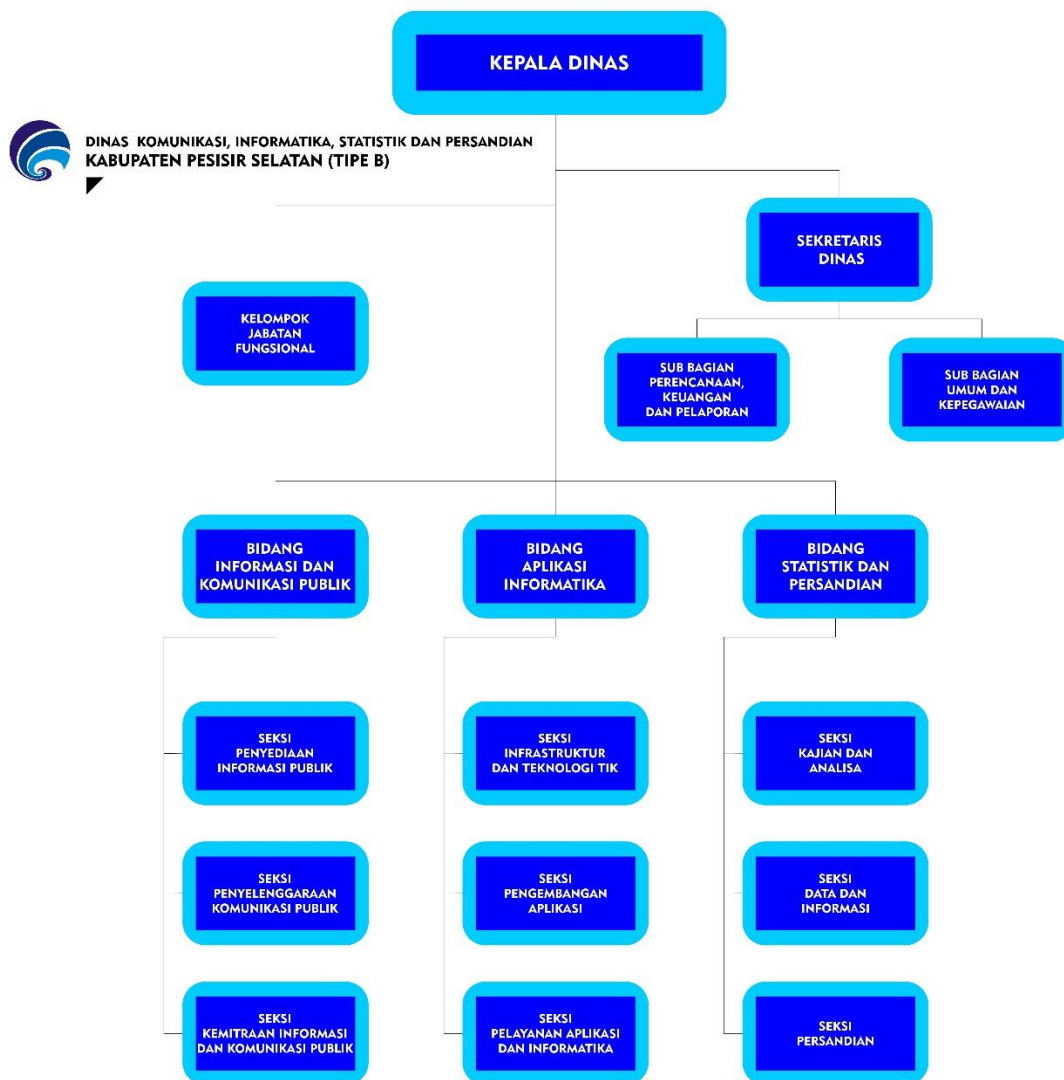
PENDAHULUAN

1.1 PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Komunikasi dan Informatika; yang tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 4 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- Tugas :
 - membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- Fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMINFO KABUPATEN PESISIR SELATAN



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai berikut

Komposisi SDM Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 adalah sebanyak **36** (tiga puluh enam) orang Aparatur Sipil Negara. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT / GOL	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	PEMBINA UTAMA MADYA / IV c	1
2	PEMBINA TK.I/ IV b	2
3	PEMBINA / IV a	1
4	PENATA TK. I / III d	9
5	PENATA / III c	3
6	PENATA MUDA TK.I / III b	2
7	PENATA MUDA/ III a	11
8	PENGATUR TK. I, II/d	1
9	PENGATUR / II c	6
JUMLAH		36

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	S3	-
2	S2	6
3	S1 / D4	19
4	D III	7
5	D II	-

6	SMU/SMA Sederajat	4
7	SMP	-
8	SD	-
	JUMLAH	36

Tabel 1.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Struktural

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	DIKLAT PIM II	1
2	DIKLAT PIM III	2
3	ADUM/DIKLAT PIM IV	5
	JUMLAH	8

Tabel 1.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya

NO.	JABATAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	STRUKTURAL	7
2	FUNGSIONAL TERTENTU	22
3	FUNGSIONAL UMUM	7
	JUMLAH	36

b. Sarana dan Prasarana Penunjang

Asset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.5
Aset/Modal Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Asset	Jumlah	Satuan	Keterangan
------------	--------------	---------------	---------------	-------------------

1	Kendaraan Dinas (Mobil)	3	Buah	
2	Kendaraan Dinas (Motor)	10	Buah	
3	Studio Radio Langkisau	1	Unit	
4	Kamera Foto Biasa	2	Buah	
5	Komputer/Destop	14	Buah	
6	Laptop	20	Buah	
7	Server	4	Unit	
8.	GPS	1	Unit	
9.	Infocus	2	Unit	
10.	CCTV	26	Unit	
11.	NVR	4	Unit	
12.	Handicam	1	Unit	
13.	Kamera Studio	2	Unit	
14.	Televisi	7	Buah	
15.	Mini PC	3	Unit	
	Jumlah	100		

1.2. PERMASALAHAN UTAMA

Berdasarkan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, maka isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Bentang geografis Kabupaten Lumajang yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakat.
2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK) dan blank spot pancaran sinyal radio.
3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK /gagap teknologi (gaptek).
4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika.
5. Kurang optimalnya ketersediaan data yang mutakhir.
6. Belum optimalnya sistem persandian yang modern.
7. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya.

8. Belum optimalnya penyebaran informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal berita hoax
9. Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat
10. Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah
11. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah
12. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
14. Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
15. Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah.

1.3 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan bermartabat didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”**

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Misi I sebagai berikut :

1. Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran

Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2021 ada dua sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi
2. Meningkatnya keterbukaan informasi public

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun yang ditandatangani antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,20
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	93 (Informatif)

Dalam mewujudkan sasaran strategis yang sudah direncanakan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Program dan Anggaran dari program tersebut pada tahun 2021 yang tertera pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Program dan Anggaran

Program	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.959.445.729,0
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 691.781.294,0
Program Aplikasi Informatika	Rp. 3.539.899.200,0
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 88.770.000,0
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 30.438.340,0
Total Anggaran	Rp. 8.310.334.563,0

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mengukur keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika maka Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran yang disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama dan target capaian Tahun 2021
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Misi I : Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.		
1. Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	<i>Jumlah Indikator Yang Terpenuhi</i> (3,20)
2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	<i>Nilai Keterbukaan Informasi Publik</i> (93 Informatif)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Klasifikasi	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		2021		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Kualitas layanan	1.	Indeks Layanan Pemerintahan	3,20	3,34	104%

komunikasi dan informasi		Berbasis Elektronik			
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	1.	Niai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (93%)	Informatif (99)	100%
Rata-rata capaian (%)					100 %

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.3.1 Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator yang bisa diuraikan di bawah ini :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		2021		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Kualitas layanan komunikasi dan informasi	1.	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,20	3,34	104%

Pencapaian Target pada indikator sasaran “Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik” selaras dengan tercapainya target capaian pada RPJMD Kabupaten dan juga selaras pada RPJMD Provinsi.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas

instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal. Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Tabel 3.4
Predikat Nilai SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik

Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Peringkat 6 Tingkat Kabupaten/Kota Se Indonesia.

10 Besar Nasional Indeks SPBE Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2021		
01	Kabupaten Bantul	3,62 Sangat Baik
02	Kabupaten Banyuwangi	3,53 Sangat Baik
03	Kabupaten Sumedang	3,52 Sangat Baik
04	Kota Tangerang	3,40 Baik
05	Kabupaten Karawang	3,39 Baik
06	Kabupaten Pesisir Selatan	3,34 Baik
07	Kabupaten Ciamis	3,32 Baik
08	Kabupaten Lamongan	3,32 Baik
09	Kabupaten Gresik	3,31 Baik
10	Kota Pontianak	3,31 Baik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021

Gambar 2.1 10 Besar Nasional Indeks SPBE Tingkat Kab/Kota Tahun 2021

Dapat dilihat rata-rata capaian dari indikator kinerja sasaran Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sebesar 104%. Berdasarkan klasifikasi dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian strstegis dan indikator kinerja tahun 2021 **Sangat Baik**.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		2021		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	1.	Niai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (93)	Informatif (99)	100%

Meningkatnya target capaian kinerja pada indikator sasaran strategis kedua yaitu “Niai Keterbukaan Informasi Publik” pada rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 tentunya juga berimplikasi terhadap peningkatan target capaian pada sasaran RPJMN .

Dalam pencapaian Nilai Keterbukaaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 menyediakan :

1. Pengumuman Informasi Publik yang disampaikan :
 Daftar Informasi Publik (DIP) terdiri dari OPD = 7.027 dan Nagari = 2.1976
 Total DIP 9.223
2. Informasi Publik yang disediakan dan Jenis-jenis informasi :
 - a. Informasi Berkala
 - b. Informasi Setiap Saat
 - c. Informasi Serta Merta
 - d. Informasi Dikecualikan
3. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
 - Dokumentasi Informasi Publik (DIP)
 Kabupaten Pesisir Selatan untuk ke empat kalinya mendapatkan nilai “Informatif”



Gambar 2.2 Piagam dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir dari Komisi Informasi Tahun 2021

Dapat dilihat rata-rata capaian dari indikator kinerja sasaran kedua adalah sebesar 100%. Berdasarkan klasifikasi dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian strstegis dan indikator kinerja tahun 2021 **Sangat Baik**.

3.3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi tahun lalu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan
Realiasasi Kinerja Tahun Lalu (2020)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2020	Naik/Turun % Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kualitas layanan komunikasi dan informasi	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,34 (Dengan Indikator yang lebih banyak dan kompleks)	3,34	0%
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Niai Keterbukaan Informasi Publik	99 (Informatif)	99 (Informatif)	0%

Hasil Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan indikator kinerja sasaran sudah tercapai, hal itu dapat ditunjukkan dengan Hasil Capaian Kinerja rata-rata pada table diatas. Dari tabel diatas dapat diberikan penjelasan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2021 memenuhi target yang ada dalam Rencana Strategis dibandingkan dengan tahun 2020. Jika dilihat capaian kinerja tahun 2021, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran strategis ini tetap .

3.2.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target kinerja jangka menengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 triwulan I dengan target kinerja jangka menengah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target kinerja jangka menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Tahun 2021	Tingkat Capaian
1	2		3	5
Meningkatkan Kualitas layanan komunikasi dan informasi	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,20	3,34 (Dengan Indikator yang lebih banyak dan komplek)	100%
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Niai Keterbukaan Informasi Publik	93	99 (Informatif)	100%

Meningkatnya target capaian pada indikator sasaran “Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik” selaras dengan tercapainya target capaian pada RPJMD Kabupaten dan juga selaras pada RPJMD Provinsi. Selanjutnya, dengan meningkatnya target capaian kinerja pada indikator sasaran strategis kedua yaitu “Niai Keterbukaan Informasi Publik” pada rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan pada

tahun 2021 tentunya juga berimplikasi terhadap peningkatan target capaian pada sasaran RPJMN .

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Pada tahun 2021, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi Rp. 8,230,501,163
2. Belanja Modal Rp. 79,833,400
3. Alokasi Total Belanja Rp. 8.310.334.563

Dari total anggaran sebesar Rp. 8.310.334.563 tersebut sampai akhir Tahun 2021 terserap sebesar :

1. Belanja Operasi Rp. 7.959.530.784
2. Belanja Modal Rp. 77,533,000
3. Alokasi Total Belanja Rp. 8,037,063,784

Presentase serapan anggaran di Tahun 2021

a. Belanja Operasi

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Alokasi Belanja Operasi}} \times 100\% \\ &= \frac{7.959.530.784}{8,230,501,163} \times 100\% \\ &= 97\% \end{aligned}$$

b. Belanja Modal

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Alokasi Belanja Modal}} \times 100\%$$

$$= \frac{77,533,000}{79,833,400} \times 100\%$$

$$= 97\%$$

c. Total Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Total Belanja}}{\text{Alokasi Total Belanja}} \times 100\%$$

$$= \frac{8,037,063,784}{8.310.334.563} \times 100\%$$

$$= 97\%$$

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 72 Personil yang terdiri dari : 35 orang PNS, 24 Orang Non PNS. Dari jumlah tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari Pusat sehingga banyak personil yang merangkap tugas di luar tugas, pokok dan fungsi masing-masing

Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan Tahun 2021 merupakan tingkat pencapaian target dari masing – masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, realisasi keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan .

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8 Target Anggaran Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN			JUMLAH DANA	REALISASI	Persentase
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8.310.334.563	8.037.063.784	97
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.959.445.729	3.766.250.146	97
	1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.301.862.524	3.211.203.020	95
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.207.062.524	3.122.743.020	97
		- Belanja Pegawai		3.207.062.524	3.122.743.020	97
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		94.800.000	88.460.000	93
		- Belanja Pegawai		94.800.000	88.460.000	93
	2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		308.303.743	278.931.034	90
	3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10.432.180	10.225.450	98
		- Belanja Barang dan Jasa		10.432.180	10.225.450	98
	4	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		67.553.400	63.184.000	94

			- Belanja Barang dan Jasa	28.550.000	25.801.000	90
			- Belanja Modal	39.003.400	37.383.000	96
		5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.175.663	35.980.183	99
			- Belanja Barang dan Jasa	36175663,0	35.980.183	99
		6	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.994.000	22.861.300	99
			- Belanja Barang dan Jasa	22.994.000	22.861.300	99
		7	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	4.310.000	80
			- Belanja Barang dan Jasa	5.400.000	4.310.000	80
		8	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	16.843.500	7.016.500	42
			- Belanja Barang dan Jasa	16.843.500	7.016.500	42
		9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.905.000	135.353.601	91
			- Belanja Barang dan Jasa	148.905.000	135.353.601	91

	3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0
		10	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	0	0
			- Belanja Modal	-	0	0
	4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		199.123.881	137.110.560	69
		11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.245.381	84.094.260	60
			- Belanja Barang dan Jasa	140.245.381	84.094.260	60
		12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.878.500	53.016.300	90
			- Belanja Barang dan Jasa	58.878.500	53.016.300	90
	5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		150.155.581	139.005.532	93
		13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.155.581	139.005.532	93
			- Belanja Barang dan Jasa	150.155.581	139.005.532	93

		14	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	0	0
			- Belanja Barang dan Jasa	0	0	0
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			691.781.294	654.491.716	95
	1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		691.781.294	654.491.716	95
		1	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	0	0	0
			- Belanja Pegawai	0	0	0
			- Belanja Barang dan Jasa	0	0	0
		2	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	284.615.144	283.207.316	100
			- Belanja Pegawai	16.200.000	16.200.000	100

			- Belanja Barang dan Jasa	268.415.144	267.007.316	99
		3	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	170.194.150	167.344.400	98
			- Belanja Pegawai	6.600.000	6.600.000	100
			- Belanja Barang dan Jasa	163.594.150	160.744.400	98
		4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	236.972.000	203.940.000	86
			- Belanja Pegawai	6.000.000	6.000.000	100
			- Belanja Barang dan Jasa	230.972.000	197.940.000	86
III	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			3.539.899.200	3.502.776.472	99
	1	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		3.539.899.200	3.502.776.472	99

		1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	0	0	0
			- Belanja Barang dan Jasa	0	0	0
		2	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	3.539.899.200	3.502.776.472	99
			- Belanja Pegawai	21.000.000	21.000.000	100
			- Belanja Barang dan Jasa	3.478.069.200	3.441.626.472	99
			- Belanja Modal	40.830.000	40.150.000	98
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			88.770.000	84.801.000	96
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		88.770.000	84.801.000	96

		1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	88.770.000	84.801.000	96
			- Belanja Pegawai	6.000.000	7.200.000	100
			- Belanja Barang dan Jasa	82.770.000	77.601.000	95
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			30.438.340	28.744.450	94
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		30.438.340	28.744.450	94
		1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	30.438.340	28.744.450	94
			- Belanja Pegawai	6.000.000	6.000.000	100
			- Belanja Barang dan Jasa	24.438.340	22.744.450	93

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari laporan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 khususnya di tahun anggaran 2021 dapat terpenuhi sesuai harapan. Dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan baik sesuai ketentuan. Namun hal tersebut, bila ditinjau dari segi anggaran tidak semua mencapai 100% hal tersebut disebabkan adanya efisiensi anggaran.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian kinerja di tahun mendatang perlu dibuat rencana tindak lanjut. Beberapa rencana tindak lanjut untuk mendukung keberhasilan capaian Program dan Kegiatan pada tahun 2022 antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, tenaga ahli IT dan persandian untuk meningkatkan keamanan informasi pemda;
2. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah terutama terkait dengan penyediaan informasi yang harus dipublikasikan maupun informasi yang diminta oleh masyarakat dari Perangkat Daerah dan informasi yang terkait dengan data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khususnya yang mendukung kerjasama stakeholder (Pemerintah/Instansi, Swasta, Masyarakat) dan wartawan agar tercipta sebuah sinergitas yang baik antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan insan Pers;
4. Meningkatkan standart layanan yang baik dan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan berbasis SPBE dan terwujudnya Smart City serta pembelajaran online.

DAFTAR PRESTASI BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2019

No .	Perangkat Daerah	Nama Prestasi	Lokasi, Tanggal dan Tahun Perolehan Prestasi	Asal Prestasi	Foto	Ket.
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Juara 1 (Informatif) PPID UTAMA Kabupaten Pesisir Selatan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Se-Sumatera Barat Tahun 2019 Kategori Kabupaten/Kota	Kyriad Bumiminang Hotel Padang, 6 Desember 2019	Komisi Informasi Sumatera Barat	<i>lampiran</i>	
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Achievement Motivation Person Tahun 2019 untuk Bupati Pesisir Selatan (H. Hendrajoni, SH., MH.) dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Se-Sumatera Barat Tahun 2019.	Kyriad Bumiminang Hotel Padang, 6 Desember 2019	Komisi Informasi Sumatera Barat	<i>lampiran</i>	
3.	Nagari Lunang Tiga Kabupaten Pesisir Selatan	Juara 2 (Menuju Informatif) Kategori Desa/Nagari dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Se-Sumatera Barat Tahun 2019.	Kyriad Bumiminang Hotel Padang, 6 Desember 2019	Komisi Informasi Sumatera Barat	<i>lampiran</i>	
4	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Temu Karya Membuat Bahan Ajar Berbasis TIK Kategori Game Edukatif	Kristal Hotel Jakarta Selatan, 15 November 2019	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	<i>lampiran</i>	
5	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Peringkat Nomor Nilai SPBE tertinggi se Sumbar (2,59) Nilai Indeks SPBE : 1. Kota Padang (2,63) 2. Kab. 50 Kota (2,61) 3. Kab. Pessel (2,59)	Pangeran Beach Hotel Padang 19 Agustus 2019, Disampaikan Gubernur Pada Acara Rakor Bupati /Walikota	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	<i>lampiran</i>	

Lampiran 1 : JUARA 1 ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SE SUMATERA BARAT (INFORMATIF)
BUPATI PESISIR SELATAN (H. HENDRAJONI, SH., MH.) MENDAPATKAN ACHIEVEMENT MOTIVATION PERSON TAHUN 2019



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Se - Sumatera Barat Tahun 2019

Kategori Kabupaten/Kota

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Sebagai Badan Publik

INFORMATIF

**Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Padang, 6 Desember 2019

komisi informasi sumatera barat



Adrian Tuswandi, S.H



**KOMISI INFORMASI
SUMATERA BARAT**



HAK ANDA UNTUK TAHU



**PPID UTAMA KAB. PESISIR SELATAN RAIH JUARA 1 (INFORMATIF)
DI ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SE SUMATRA BARAT
TAHUN 2019**

Lampiran 2 : Achievement Motivation Person Tahun 2019 untuk Bupati Pesisir Selatan



Lampiran 3 : Juara 2 (Menuju Informatif) Kategori Desa/Nagari dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Se-Sumatera Barat Tahun 2019.



PPID Kabupaten Pesisir Selatan Meraih Juara 1 dan Nagari Lunang Tiga Juara 2 di Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Se Sumatera Barat Tahun 2019 (06/12/2019)



Nagari Lunang Tiga meraih Juara 2 (Menuju Informatif) Kategori Desa/Nagari dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Se-Sumatera Barat Tahun 2019

Lampiran 4: Juara II Temu Karya Membuat Bahan Ajar Berbasis TIK Kategori Game Edukatif





KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SERTIFIKAT

Nomor : 24843/I2.3/PP/2019

Diberikan kepada :

RIKI DWI PUTRA
(DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KABUPATEN
PESISIR SELATAN)

telah berperan aktif sebagai :

Juara 2 Kategori Game Edukasi

dalam kegiatan
"Temu Karya Membuat Bahan Ajar Berbasis TIK 2019"
yang dilaksanakan oleh
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
pada tanggal 12 November 2019 - 15 November 2019, di DKI Jakarta

Jakarta, 22 November 2019
Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan



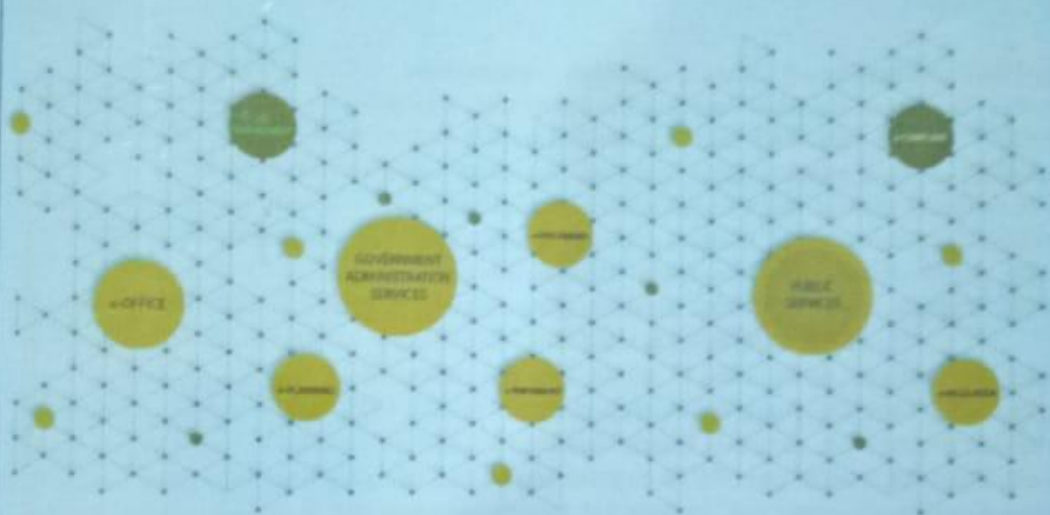
Gogot Suharwoto, Ph.D
NIP. 197102111993011002

Lampiran 5 : Peringkat Ke 3 Nilai SPBE tertinggi se Sumbar





KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



INDEKS SPBE

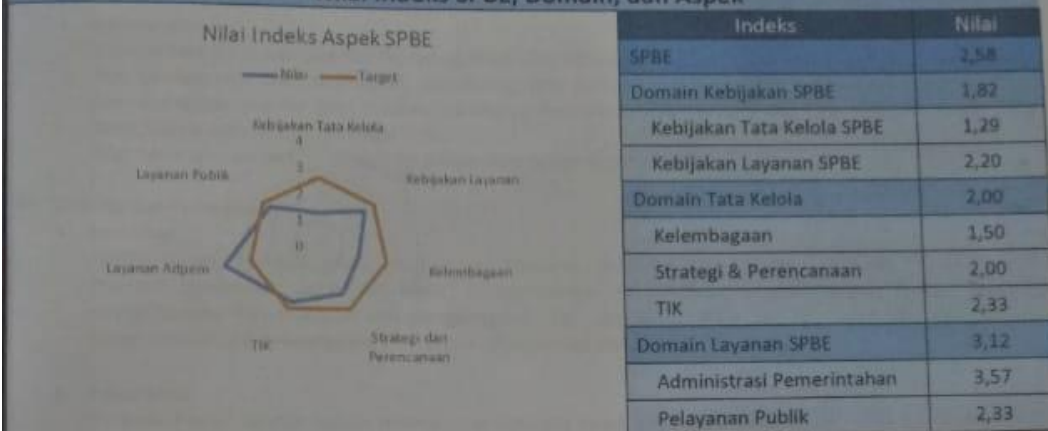
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2018

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

2,59
(Cukup)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Tata kelola

• Kekuatan

Pemkab Pesisir Selatan sudah mempunyai kebijakan terkait Pengoperasian Pusat Data. Kebijakan tersebut mewajibkan semua aplikasi diletakkan di pusat data (*data center*). Selain itu juga sudah ada draft/rancangan kebijakan Anggaran dan Belanja TIK dan Kebijakan Integrasi Sistem Aplikasi.

• Kelemahan

Pemkab Pesisir Selatan masih belum mempunyai Tim Pengarah SPBE yang bertugas secara khusus untuk mengawal penerapan SPBE di Pemerintah Daerah. Selain itu juga belum ada kebijakan Pemkab yang mendukung penerapan SPBE terkait proses bisnis terintegrasi, rencana induk SPBE, integrasi sistem aplikasi maupun aplikasi umum berbagi pakai. Draft/rancangan kebijakan Anggaran Belanja TIK dan Integrasi Sistem Aplikasi sebaiknya segera diselesaikan dan dilegalisasi.

B. Kebijakan Layanan

• Kekuatan

Sudah ada kebijakan Pemkab terkait Manajemen Kepegawaian yaitu Keputusan Bupati no 810/403/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Manajemen Kepegawaian yang mengikat seluruh UPD. Kebijakan tentang Manajemen Perencanaan dan Penganggaran diatur dalam SK Kepala Bappeda tahun 2017 tentang Penunjukan Pengelola Implementasi aplikasi e-Planning. Juga sudah ada kebijakan tentang Manajemen Kinerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati no 15 tahun 2017. Kebijakan yang berhubungan dengan Layanan Pengaduan Publik sudah diatur dalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan no 061/412/Kpts/BPT-PS/2017. Selain itu, juga sudah ada kebijakan terkait Layanan Pengadaan dan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Secara keseluruhan, Pemkab Pesisir Selatan sudah mempunyai 6 dari total 10 kebijakan Layanan SPBE.

• Kelemahan

Pemkab Pesisir Selatan masih belum mempunyai 4 Kebijakan Layanan SPBE yaitu kebijakan terkait

Penghargaan yang Diraih Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
1	Penghargaan Terbaik I dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk Kategori Kabupaten/Kota terinformatif	Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat	Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama	06 Des 2020 Novotel Hotel Bukittinggi	 

					
2.	Sekretaris Daerah Erizon, MT. selaku Pengarah PPID Kab. Pesisir Selatan mendapatkan Achievement Motivation Person Award 2020	Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat	Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama	Padang, 25 November 2020	

Penghargaan yang Diraih Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
1	Penghargaan Terbaik I dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk Kategori Kabupaten/Kota terinformatif	Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat	Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama	06 Des 2021 Novotel Hotel Bukittinggi	 The image shows a certificate titled 'Piagam Penghargaan' (Award Certificate) for 'INFORMATIF' (Informativeness). It is awarded to 'KABUPATEN PESIR SELATAN' (Pesisir Selatan Regency) in the category of 'KATEGORI : PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA' (Category: District/City Government). The award is for the 'Badan Publik Tahun 2021 yang Dilaksanakan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat' (Public Body 2021 conducted by the Information Commission of West Sumatra). The date is 'Padang, 06 Desember 2021'. The certificate is signed by the 'KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT' (Chairman of the Information Commission of West Sumatra Province) and features the official seal of the commission and a laurel wreath emblem.



2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Junaidi, S. Kom., ME, mendapatkan (Achievement Motivation Person	Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat	Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama	06 Des 2021, <i>Novotel Hotel Bukittinggi</i>	
3.	Peringkat 6 Tingkat Kabupaten/Kota Se Indonesia. (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan		

	Selatan)	Birokrasi RI			10 Besar Nasional Indeks SPBE Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2021 <table><tr><td>01</td><td>Kabupaten Bantul</td><td>3,62</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>02</td><td>Kabupaten Banyuwangi</td><td>3,53</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>03</td><td>Kabupaten Sumedang</td><td>3,52</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>04</td><td>Kota Tangerang</td><td>3,40</td><td>Baik</td></tr><tr><td>05</td><td>Kabupaten Karawang</td><td>3,39</td><td>Baik</td></tr><tr><td>06</td><td>Kabupaten Pesisir Selatan</td><td>3,34</td><td>Baik</td></tr><tr><td>07</td><td>Kabupaten Ciamis</td><td>3,32</td><td>Baik</td></tr><tr><td>08</td><td>Kabupaten Lamongan</td><td>3,32</td><td>Baik</td></tr><tr><td>09</td><td>Kabupaten Gresik</td><td>3,31</td><td>Baik</td></tr><tr><td>10</td><td>Kota Pontianak</td><td>3,31</td><td>Baik</td></tr></table> Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021	01	Kabupaten Bantul	3,62	Sangat Baik	02	Kabupaten Banyuwangi	3,53	Sangat Baik	03	Kabupaten Sumedang	3,52	Sangat Baik	04	Kota Tangerang	3,40	Baik	05	Kabupaten Karawang	3,39	Baik	06	Kabupaten Pesisir Selatan	3,34	Baik	07	Kabupaten Ciamis	3,32	Baik	08	Kabupaten Lamongan	3,32	Baik	09	Kabupaten Gresik	3,31	Baik	10	Kota Pontianak	3,31	Baik
01	Kabupaten Bantul	3,62	Sangat Baik																																										
02	Kabupaten Banyuwangi	3,53	Sangat Baik																																										
03	Kabupaten Sumedang	3,52	Sangat Baik																																										
04	Kota Tangerang	3,40	Baik																																										
05	Kabupaten Karawang	3,39	Baik																																										
06	Kabupaten Pesisir Selatan	3,34	Baik																																										
07	Kabupaten Ciamis	3,32	Baik																																										
08	Kabupaten Lamongan	3,32	Baik																																										
09	Kabupaten Gresik	3,31	Baik																																										
10	Kota Pontianak	3,31	Baik																																										